

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Rangkuman**

Dengan melihat beberapa penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
2. pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : provinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Sedangkan Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
  - Objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
  - subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor

- wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

#### 5. Dasar Pengenaan Pajak BBNKB dan Tarif BBNKB sebagai berikut :

- Dasar pengenaan pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan.

#### 4.2. Kesimpulan

Melihat penerapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan beberapa penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Proses pertama yang dilakukan dalam Bea Balik Nama adalah pendataan oleh dealer-dealer Toyota untuk pembuatan faktur pajak yang kemudian menjadi salah satu data yang harus ada dalam berkas BBNKB.

Proses kedua dan seterusnya dilakukan oleh PT New Ratna Motor dan pihak pihak terkait seperti Samsat, Polda, dan Biro Jasa. Kelengkapan yang dibutuhkan PT New Ratna Motor untuk BBNKB WP OP adalah KTP Asli dan Gesekan Rangka Mesin / cek fisik. Sedangkan untuk WP Badan adalah SIUP, NPWP, TDP, Domisili, Akte Pendirian Perusahaan, Surat Kuasa Bermaterai, dan Surat Permohonan.

Berkas rangkap dua, untuk pengurusan STNK ke Samsat masing-masing wilayah, berkas perngurusan BPKB ke Polda Jateng. Menunggu proses masing-masing pihak. Dengan besaran DPP mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Besaran tarif BBNKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor

yaitu sebesar 20%. Setelah menentukan besarnya pajak BBNKB dengan cara mengkalikan tarif dan DPP, maka pajak BBNKB dapat dibayarkan.

Masalah yang sering timbul dalam BBNKB adalah penguluran waktu pendaftaran, Masalah kelengkapan berkas oleh PT. New Ratna Motor, dan Penandatanganan pengesahan di Polda yang mengakibatkan jangka waktu pembuatan semakin lama.